



SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN REMBANG TAHUN 2022





LATAR BELAKANG



Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan REMBANG tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



LANDASAN HUKUM



Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.



Tujuan Penerapan SAKIP

- **Perencanaan lebih berorientasi kinerja dengan skenario evaluasi keberhasilan.**
- **Pelaporan lebih berorientasi pada hasil dan sesuai tanggung jawab pada tingkatan unit pelapor.**
- **Menyelaraskan dan pengintegrasian manajemen keuangan dan manajemen kinerja (penganggaran berbasis kinerja).**
- **Mendorong pimpinan melakukan monitoring dan pengendalian.**

Keterkaitan SAKIP

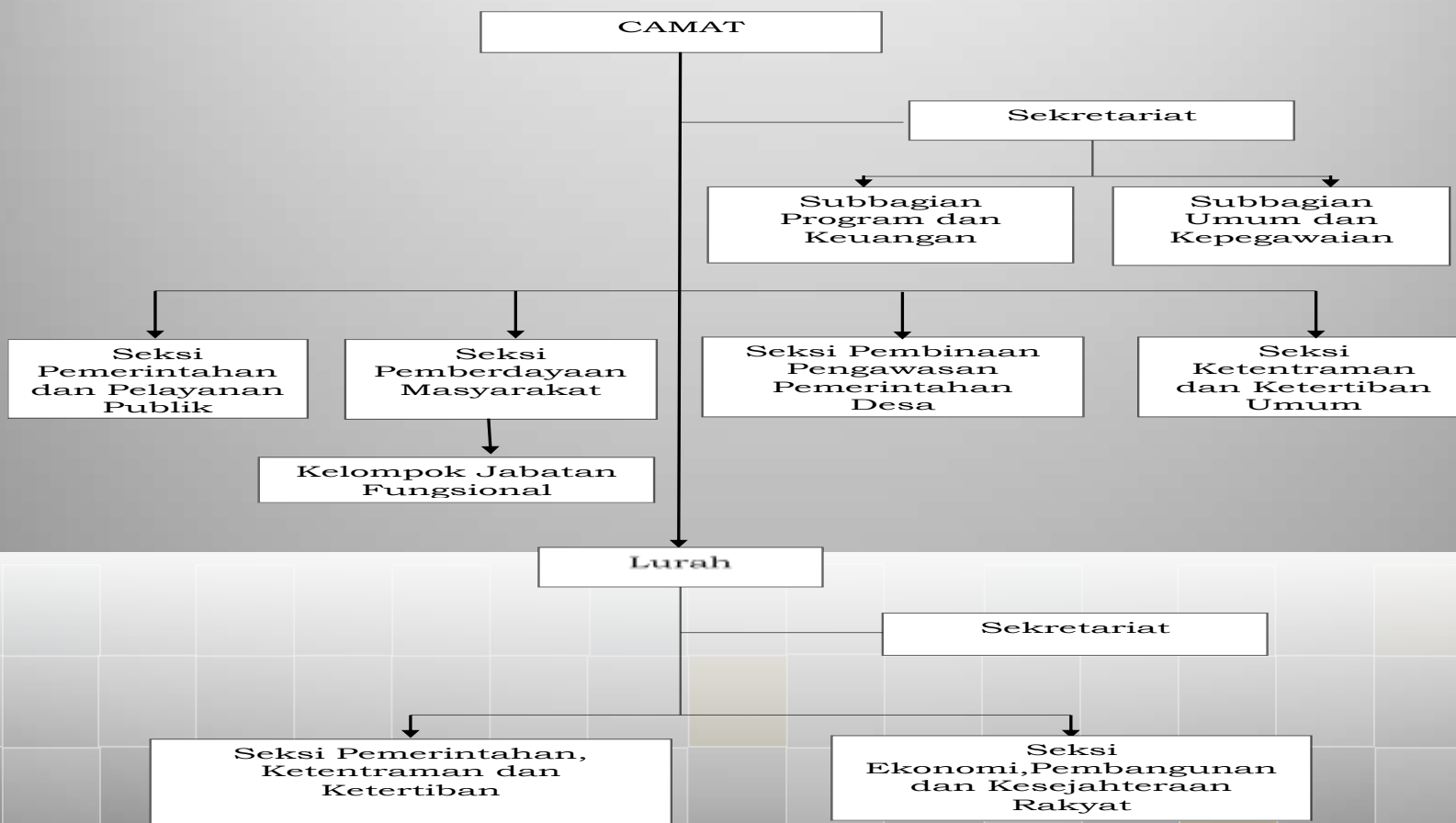
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)



GAMBARAN UMUM ORGANISASI KECAMATAN REMBANG



Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Rembang Peraturan Bupati Nomor 79 tahun 2021



Sumber Daya Aparatur



Kondisi Kepegawaian Kecamatan Rembang sampai dengan akhir Desember 2022 SDM sebanyak 57 orang meliputi 1 Camat (Eselon IIIa) , 1 Sekretaris Camat (Eselon IIIb), 4 orang Kasi di Kecamatan dan 6 orang lurah (Eselon IV.a), 2 orang Kasubag Kecamatan, 6 orang Sekretaris Kelurahan dan 14 Orang Kasi Kelurahan (Eselon IV.b) dan 23 Orang Pelaksana. Berikut Tabel Kepegawaian Kantor Kecamatan Rembang berdasarkan jenis kelamin, pendidikan dan golongan :

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Pendidikan					PNS Golongan / Ruang				Kontrak / THL	Ket
		Laki-Laki	Perempuan	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	IV	III	II	I		
1	Kecamatan REMBANG	35	22	5	28	3	20	1	2	43	12	-	25	
	Jumlah	35	22	5	28	3	20	1	2	43	12	-	25	



Tabel Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Gol / Ruang

No	Uraian	RUANG				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Camat	1				1
2	Sekretaris Kecamatan	1				1
3	Seksi Pemerintahan		1			1
4	Seksi Ketenterman dan Ketertiban		1			1
5	Seksi PMD		1			1
6	Seksi Kesejahteraan Masyarakat		1			1
7	Sub Bagian Perencanaan & Keuangan		1			1
8	Sub Bagian Umum & Kepegawian		1			1
9	Lurah		6			6



No	Uraian	RUANG				Jumlah
		IV	III	II	I	
10	Sekretaris Lurah		6			6
11	Seksi Pemerintahan ketentraman dan ketertiban		7			7
12	Seksi Ekonomi pembangunan dan kesejahteraan rakyat		7			7

ISU – ISU STRATEGIS



No	Isu Strategis	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya tata kelola dan reformasi birokrasi.	<ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif;• Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Kecamatan	<ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya pengawasan melekat;• Belum dilaksanakan review SOP Pelayanan;• Belum memadainya Sarana prasarana penyelenggaraan pelayanan PATEN;• Belum cukup tertatanya sistem pembinaan PNS dan kinerja PNS;• Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas aparatur kecamatan;• Minimnya Aparatur yang menguasai IT;• Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Desa secara berkala dan terintegrasi;



No	Isu Strategis	Masalah	Akar Masalah
2	Rendahnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan desa	<ul style="list-style-type: none">• Rendahnya kinerja Pemerintah Desa.• Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan.• Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dan kelembagaan pendukung pemberdayaan masyarakat.• Rendahnya kesadaran hukum masyarakat.	<ul style="list-style-type: none">• Kurangnya Pembinaan dan pengawasan bagi Pemerintah Desa.• Belum optimalnya kemampuan lembaga pemerintahan desa.• Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan masih kurang.• Masih banyaknya perangkat desa yang kurang kompeten.• Kurangnya pembinaan dan pendampingan bagi lembaga desa (bidang sosial, ekonomi dan budaya).• Minimnya kemampuan dan ketrampilan aparat Linmas.



PERENCANAAN KINERJA



A. RENCANA STRATEGIS

Kecamatan REMBANG telah menyusun Renstra Perubahan Tahun 2021 – 2026 yang merupakan manifestasi komitmen Kantor Kecamatan REMBANG dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021- 2026 .

1. Visi

Dengan mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Rembang maka Kecamatan REMBANG memiliki Visi sebagai berikut **“Menjadikan Kantor Kecamatan Rembang Sebagai Fasilitator Tempat Pelayanan Masyarakat yang Prima Dengan Memanfaatkan Potensi Wilayah”**.



2. Misi





3. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan Visi – Misi tersebut di atas maka tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

“Meningkatkan kualitas pelayanan Publik”

4. Sasaran

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Visi OPD Kecamatan REMBANG tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

“Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan “



5. Indikator Kinerja Utama

Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama tahun 2021 -2022 Kecamatan REMBANG, Kabupaten Rembang.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik Kecamatan REMBANG	Nilai SAKIP Kecamatan REMBANG	60
		Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan REMBANG	83

B. PERJANJIAN KINERJA



Kecamatan REMBANG pada tahun 2022 melaksanakan 5 Program dan 10 kegiatan dan 33 sub kegiatan yang didukung oleh APBD Induk sebesar Rp 10.452.372.975,- terdiri dari :

Perkin

Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 5 kegiatan dan 23 sub kegiatan pekerjaan;

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan;

Program Pemberdayaan masyarakat Desa terdiri dari 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan

AKUNTABILITAS KINERJA



A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		
		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5=(4/3)
Urusan Umum	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,1	3,1	100
Kacamatan Rembang	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	84,19	101
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota	Nilai SAKIP OPD Kec Rembang	60	61,21	102
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	85	99,75	117,35
Administrasi Keuangan perangkat daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100	98,14	98,14

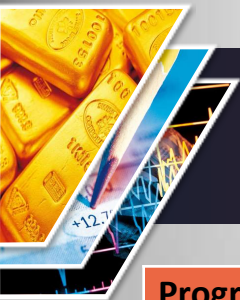
LANJUTAN.....



Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan pelayanan umum	100	99,30	99,30
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% BMD Dengan Kondisi Baik	80	97,10	121
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Umum	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	91,07	91,07
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	100	100	100
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	persentase penyelenggaraan penunjang kesejahteraan	100	100	100
		100	100	100



Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tingkat Kinerja seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	100	97,59	97,71
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pelaksanaan pembangunan secara swakelola Persentase penetapan APBDes tepat waktu	100	97,71	97,71
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata Rata IKM kEL	60	84,33	84,33
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100
Koordinasi upaya penyelenggaraan dan ketertiban umum	Persentase penyelesaian permasalahan k-3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100	100	100



Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik	100	99,92	99,92
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	Rata-rata IKM Desa	65	na	na



REALISASI ANGGARAN 2022

NO	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Selisih	Prosentase (%)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.923.643.026	6.778.474.049	145.168.976	97,90
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.000.000	31.920.000	80.000.000	99,75
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.035.289.000	5.923.083.923	112.185.077	98,14
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.374.025	89.740.850	633.175	99,30

LANJUTAN.....



4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.000.000	152.079.595	14.920.405	91,07
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	599.000.000	581.649.881	17.350.319	97,10
II.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	72.100.000	72.099.550	450	100,00
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	72.100.000	72.099.550	450	100,00

LANJUTAN.....



III.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3.272.104.950	3.190.642.799	81.462.151	97,51
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	121.754.950	121.402.900	352.050	99,71
2.	Pemberdayaan Kelurahan	3.150.350.000	3.069.239.899	81,110,101	97,43
IV.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	98.125.000	98.125.000	0	100
1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	98.125.000	98.125.000	0	100

LANJUTAN.....



V.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	86.400.000	86.337.000	63.000	99,93
1.	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	86.400.000	86.337.000	63.000	99,92
	Jumlah	10.452.372.975	10.225.678.398	226.694.577	97,83



Permasalahan atau Kendala yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya :

- Masyarakat belum sadar sepenuhnya untuk memiliki dokumen-dokumen pribadi;
- Terbatasnya tenaga profesional dibidang pelayanan Rendahnya kinerja Pemerintah Desa
- Kurangnya staf dimasing-masing bidang di Kecamatan Rembang
- Kurangnya sarana prasarana perkantoran



Strategi Pemecahan Masalah

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang kependudukan dan bidang lain yang menjadi kewenangan Camat, dengan kebijakan:
 - a. Mensosialisasikan pentingnya memiliki dokumen pribadi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui rapat koordinasi lintas sektoral ;
 - b. Mengoptimalkan tenaga/karyawan yang ada untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;



• TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP KANTOR KECAMATAN REMBANG TAHUN 2021

NO	REKOMENDASI EVALUASI ATAS CAPAIAN KINERJA	RENCANA AKSI
1	Mempublikasikan Perjanjian Kinerja (PK)	Perjanjian Kinerja (PK) sudah di publikasikan dalam wensite
2	Mempublikasikan Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama sudah di publikasikan dalam website
3	Mengupload ke dalam website Laporan Kinerja	Telah di Upload kedalam website Laporan Kinerja
4	Informasi kinerja yang disajikan agar digunakan untuk peningkatan kinerja	Informasi kinerja yang disajikan akan kami gunakan untuk peningkatan kinerja
5	Pemantauan Rencana Aksi agar dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja	Pemantauan Rencana aksi akan kami laksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja
6	Untuk lebih meningkatkan capaian kinerja dari tahun sebelumnya	Akan kami tingkatkan



TERIMA KASIH